

ANTISIPASI IKUT TAWURAN

Pemkot Tangerang Imbau Masyarakat Awasi Kegiatan Anak

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kota Tangerang, Banten, mengimbau kepada masyarakat mengawasi keluarga atau putra - putrinya untuk tidak melakukan hal-hal kurang berkenan selama Ramadhan seperti tawuran, main petasan atau melakukan sahur on the road.

"Kita ingin semua dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan aman, nyaman dan kondusif, sehingga mendapat keberkahan dari Allah SWT," kata Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang Jumat (24/3).

Ia mengatakan Ramadhan adalah momentum untuk melatih kesabaran diri. Banyak manfaat dan berkah yang bisa kita dapatkan dan raih saat menjalani ibadah di Bulan Ramadhan.

"Ini jadi tantangan besar bagi kita semua, dan bagi yang bisa melewatinya

insya Allah ganjaran pahala berlipat ganda dari Allah SWT. Hidup kita jadi tenang, damai dan bisa saling mengasihi satu sama lain," ujarnya.

Sementara itu Wali Kota Tangerang, Arief Wisnansyah mengajak masyarakat Muslim Kota Tangerang dapat memanfaatkan Ramadhan tahun ini sebagai momen untuk memaksimalkan ibadah.

Ia berharap, agar datangnya bulan suci Ramadhan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk dapat istiqomah dalam menjalankan berbagai ibadah di bulan yang penuh berkah dan juga ampunan.

"Jamaah yang istiqomah akan dapat hadiah umrah, semoga menjadi motivasi bagi semua, sedangkan hadiah utamanya berupa berkah dan ketaqwaan di hadapan Allah SWT," ungkapnya. ● pp

Pemkot Tangerang Gandeng BSSN Terkait Penerapan Tanda Tangan Elektronik

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk penyelenggaraan sertifikasi elektronik berupa tanda tangan elektronik.

Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang, Indri Astuti di Tangerang, Jumat (24/3), mengatakan untuk mendukung transformasi digital dan optimalisasi pemanfaatan sistem pemerintah berbasis elektronik, maka pemanfaatan sertifikat elektronik akan sangat memudahkan proses bisnis di pemerintah daerah.

"Penerapan tanda tangan elektronik punya peran penting bagi kami pemerintah daerah, sekaligus bentuk komitmen kami Pemkot Tangerang," kata Indri Astuti dalam keterangannya di Tangerang.

Indri melanjutkan Pemkot Tangerang terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kota Tangerang.

Penggunaan tanda tangan elektronik itu, kata dia, selain sudah sangat diperhitungkan spesifikasi keamanannya, juga bisa dicek validasinya.

Kemudian, lanjut dia, penggunaan tanda tangan elektronik juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.

Indri juga mengucapkan terima kasih kepada BSSN karena setelah ditandatangani perpanjangan kerja sama tersebut, sehingga pemanfaatan sertifikat elektronik antara BSSN dan Pemkot Tangerang bisa lebih bermanfaat.

"Semoga ini bisa menjadi bagian dari transformasi yang dilakukan Pemkot untuk memberikan kemudahan dan percepatan kerja maupun pelayanan," kata Indri Astuti. ● pp



OPERASI PASAR MURAH RAMADHAN

Sejumlah warga antre membeli paket sembako murah saat digelar Operasi Pasar murah Ramadhan di Kantor Kecamatan Telukbetung Barat, Bandar Lampung, Lampung, Jumat (24/3). Operasi pasar yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandar Lampung itu bertujuan untuk mencegah terjadinya gejolak harga sembako dan inflasi saat bulan Ramadhan.

JEMBATAN SURIANEN DIPERBAIKI

DPRD Pandeglang Minta Kontraktor Sediakan Perahu untuk Penyebrangan

Warga baik dari Pagelaran maupun Patia yang hendak menyebrang, harus memutar jauh ke jalur Cikuya. Sementara jaraknya lumayan jauh, karenanya harus ada jalur alternatif lain yaitu perahu untuk menyebrang sungai, kata Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi.

PANDEGLANG (IM)

- Arus lalu lintas di jalur Pagelaran-Patia saat ini dialihkan ke jalur lain, lantaran jembatan Surianen yang meng-

hubungkan dua kecamatan tersebut sedang dilakukan perbaikan.

Selama proses perbaikan berlangsung, ruas jalan

Pagelaran-Patia tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga para pengendara dari arah Pagelaran maupun sebaliknya harus memutar ke wilayah Cikuya.

Melihat kondisi tersebut, Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi meminta kepada pihak kontraktor pelaksana proyek tersebut, untuk menjalin koordinasi dengan BPBD Pandeglang, supaya menyiapkan perahu karet untuk penyebrangan warga.

"Warga baik dari Pagelaran maupun Patia yang hendak menyebrang, harus memutar ke jalur Cikuya. Sementara jaraknya lumayan jauh, maka harus ada alternatif lain yaitu perahu untuk menyebrang sungai," ungkapnya, kemarin.

Diakuinya, tidak sedikit warga yang mengadu kepada dirinya akan sulitnya akses penyebrangan sejak dibangunnya jembatan Surianen.

Meski warga menyambut baik dengan program pembangunan tersebut, tapi harus ada alternatif untuk warga menyebrang supaya aktivitasnya tidak terhambat.

"Banyak yang mengadu kepada saya, warga sangat menyambut baik dengan program pembangunan jembatan itu. Tapi warga menginginkan ada sarana buat penyebrangan salah satunya perahu," katanya.

Politisi Gerindra itu berharap, pihak kontraktor maupun BPBD Pandeglang bisa menyediakan perahu untuk warga menyebrang. Karena meski ada jalur lain, tapi tidak semua masyarakat dapat mengaksesnya, soalnya jalan tempuh yang cukup jauh.

"Selain ada jalur alternatif yaitu ke wilayah Cikuya, tapi sebagian warga yang lain juga membutuhkan perahu buat menyebrang," ujarnya.

Diketahui, sebelumnya memang sempat ada perahu yang disediakan bagi warga untuk menyebrang sungai. Perahu itu hasil dari swadaya masyarakat, namun sekarang tidak ada lagi.

"Beberapa hari lalu sempat ada perahu hasil swadaya masyarakat, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Maka saya harap pihak terkait dapat menyediakan perahu untuk kebutuhan masyarakat," harapnya.

Diketahui, perbaikan jembatan Surianen tersebut sudah dilakukan sejak beberapa pekan lalu. Kegiatan itu program dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang, yang menelan anggaran sebesar Rp 546 juta lebih. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Rio Putra. ● pra

ANTISIPASI GANGGUAN KETERTIBAN MASYARAKAT SELAMA RAMADAN

Polres Tangsel Genjot Program Polisi RW

TANGSEL (IM) - Kepolisian Resor atau Polres Tangerang Selatan akan menggenjot program Polisi RW guna mengantisipasi terjadinya gangguan ketertibn masyarakat (kamtibmas) selama bulan Ramadan 2023.

Kepala Seksi Humas Polres Tangsel, Ipa Galih Dwi Nuryanto mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan program dari Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran itu.

"Kami Polres Tangsel sudah berjalan Polisi RW, sesuai atensi Kapolres Tangsel ke seluruh personel yang ditugaskan menjadi Polisi RW," kata dia, Jumat (24/3).

Salah satu tindak kriminalitas yang diwaspadai Polres Tangsel adalah tawuran. Menurut Galih, Kapolres Tangsel telah memerintahkan kepada jajarannya untuk

memetakan wilayah rawan gangguan kamtibmas. Salah satunya adalah pemetaan titik rawan tawuran di wilayah Polsek masing-masing.

Bahkan bila diperlukan, tambah Galih, pihaknya akan menambah personel di wilayah rawan guna mencegah tawuran.

"Nanti titik yang rawan tawuran yang akan menjadi atensi untuk dilakukan patroli dan pemantauan," ujar dia.

Galih menuturkan, personel Polres Tangerang Selatan bakal melakukan patroli rutin secara berkala.

"Masyarakat atau kelompok masyarakat yang melakukan sweeping mandiri itu tidak dibenarkan. Biar kami bersama instansi terkait yang akan melakukan tindakan sesuai aturan undang-undang, melalui tahapan imbauan sampai bila perlu akan dilakukan razia," ucapnya. ● pp

1 Juta Warga Banten Belum Ditanggung BPJS Kesehatan

SERANG (IM) - Dari sekira 12 juta penduduk Banten, sebanyak 10 juta lebih masyarakat di Banten sudah tercover BPJS Kesehatan. Namun, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, masih ada sekira 1 juta lebih masyarakat Banten belum tercover BPJS Kesehatan.

Kepala Dinkes Provinsi Banten, dr Ati Pramudji Hastuti mengatakan, masyarakat Banten yang sudah tercover oleh BPJS Kesehatan itu sudah 92,2 persen atau sekitar 10 juta lebih. Sebanyak 10 juta masyarakat yang tercover BPJS Kesehatan itu terdiri dari penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah ataupun non-PBI yang dibayar baik secara mandiri atau dibayarkan oleh perusahaan.

Ati mengatakan, ada 3 juta masyarakat Banten yang masuk dalam PBI yang dibiayai APBN. Sedangkan Pemprov Banten sendiri, membiayai 750 ribu masyarakat di enam kabupaten/kota dengan anggaran sekira Rp400 miliar.

Untuk mencapai 100 persen agar penduduk Banten tercover BPJS Kesehatan semua, pihaknya mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota

untuk bisa membantu warganya agar bisa tercover oleh BPJS Kesehatan.

Ia menyebut, sudah ada lima kabupaten kota di Banten yang sudah dinobatkan sebagai UHC (Universal Health Coverage). "Kalau sudah di atas 90 persen, yang sudah tercover BPJS Kesehatan itu sudah UHC," ungkap Ati, Jumat (24/3). Kelima daerah itu yakni, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang.

Ia mengungkapkan, ada kelebihan daerah yang sudah tercover BPJS Kesehatan itu adalah warga yang belum terdaftar BPJS, kemudian akan mengajukan pendaftaran BPJS Kesehatan, maka prosesnya lebih cepat. "Kepesertaan BPJS mereka bisa langsung aktif tanpa harus menunggu berbulan-bulan," ujarnya.

Bagi daerah yang memiliki fiskal tidak tinggi, ia berharap ada subsidi silang melalui program cooperative social responsibility (CSR) dari pihak swasta di Tangerang Raya kepada Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. "Sehingga bisa membantu," tuturnya. ● pra

Sahur on the Road di Kota Tangerang Wajib Kantongi Izin

TANGERANG (IM) - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang, Polda Banten menyuarakan kepada masyarakat atau komunitas di wilayahnya itu yang hendak menggelar kegiatan "Sahur on the Road" (SOTR) untuk dapat memiliki izin resmi dari kepolisian setempat.

"Sebetulnya kegiatan "Sahur on the Road" ini diperbolehkan. Tetapi bagi masyarakat atau komunitas harus ada persyaratan (izin) secara via telepon maupun menginformasikan ke kami, tidak harus datang ke kantor," kata Kasatintelkam Polresta Tangerang, Kompol Moch Sopian kepada di Tangerang, kemarin.

Menurutnya, kebijakan semacam ini diambil pihaknya sebagai langkah dalam mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan atau dapat mengganggu ketertibn lingkungan masyarakat selama Bulan Suci Ramadhan

1444 hijriah.

"Karena memang saat ini banyak kegiatan yang banyak disalahgunakan oleh kelompok remaja. Seperti aksi tawuran, balap liar dan sebagainya dengan berakhir gesekan antar kelompok," katanya.

Kendati demikian, pihaknya pun menegaskan bagi siapapun yang akan menggelar kegiatan SOTR di wilayah Kabupaten Tangerang wajib mengantongi izin resmi dari kepolisian. Sebab, nantinya selama penyelenggaraan acara tersebut bakal dikawal petugas guna berjalan aman, nyaman dan terjaga. "Sehingga nanti saat dilakukan SOTR itu, masyarakat sekitar tidak riskan dengan kegiatan tersebut," ucapnya.

Kemudian, kata Sopian, jika nanti pihaknya menemukan kegiatan SOTR tanpa izin sebagaimana yang dimaksudkan, maka, petugas kepolisian tak akan

sekan-sekan membubarkannya secara tegas.

"Jadi silakan siapapun yang akan menggelar kegiatan itu untuk menelepon melalui Polsek atau Polres dengan merincikan jumlah anggota/komunitas dan titik lokasi pelaksanaannya. Sehingga kita nanti lakukan upaya pengamanan," ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam hal ini Polresta Tangerang juga akan menindaklanjuti terkait instruksi dari Presiden Joko Widodo mengenai larangan melaksanakan buka puasa bersama yang tertuang pada surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 dengan dikonfirmasi Sekretaris Kabinet, Pramono Anung pada Rabu (22/3) lalu. "Tentu kita akan mengikuti aturan pemerintah, kita akan laksanakan. Karena memang saat ini Covid-19 juga belum mereda, hanya PPKM saja ditiadakan," kata dia. ● pp



PERMINTAAN DIM SUM MENINGKAT UNTUK BERBUKA PUASA

Pekerja membuat makanan siap saji dim sum berbagai rasa di UMKM rumahan dimsum Bunda Imoet Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (24/3). Pesanan kuliner siap saji ini selama bulan Ramadhan mengalami peningkatan 100 persen dari biasanya 400 kilogram menjadi 800 kg pesanan untuk menu berbuka puasa.



ELEKTRONIFIKASI KOTAK AMAL BANK INDONESIA

Pengurus Masjid Kesultanan menggunakan layanan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran untuk infaq ke kotak amal di Masjid Kesultanan Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (24/3). Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara telah melakukan elektrifikasi kotak amal di sejumlah masjid di Ternate menggunakan QRIS guna mempermudah masyarakat beramal sekaligus mendorong ekonomi syariah di Indonesia.

Dishub Banten Pasang 600 PJU Tahun Ini

SERANG (IM) - Dinas Perhubungan (Dishub) Banten pada tahun ini akan memasang sedikitnya 600 Penerangan Jalan Umum (PJU). Ratusan PJU itu akan dipasang di sejumlah ruas jalan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Kepala Dishub Banten, Tri Nurtopo mengatakan, penambahan ratusan PJU itu dilakukan guna menerangi sejumlah ruas jalan, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengendara.

"Kita sudah anggarkan di tahun 2023 ini, bahwa akan ada penambahan 600 PJU di sejumlah titik," kata Tri Nurtopo, Jumat (24/3).

Tri mengatakan, berbeda dengan sebelumnya, pihaknya hanya memasang lampunya saja, tidak berikut tiang.

Sebab, lampu PJU nantinya akan menempel dengan tiang milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Ia mengungkapkan, penambahan itu masih jauh

dari kata cukup. Sebab, masih banyak sejumlah daerah di Banten yang masih tidak diterangi PJU.

"Ruas jalan Provinsi itu ada 800 Kilometer (km) dan jika dalam satu km-nya harus dipasang 25 PJU, maka kiranya kita butuh 20.000 PJU," ungkapnya.

Menurutnya, saat ini Pemprov hanya memiliki 3.000 unit PJU, sehingga saat ini pihaknya masih membutuhkan pengadaan secara berjenjang agar lambat laun kebutuhan itu bisa tertutupi," tuturnya.

Tri menyebut, bahwa ke 600 PJU tersebut akan di pasang di sejumlah wilayah di Banten kecuali Cilegon dan Tangerang.

"Paling banyak di Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang, kecuali Cilegon dan Tangerang," pungkasnya. ● pra